

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kajian mengenai pengaruh pemikiran yang menghubungkan tokoh dengan gerakan keagamaan dan partai politik selalu menjadi diskusi menarik dan berkembang. Tokoh atau pemikir dengan gerakan adalah mata rantai yang berkesinambungan. Masing-masing memiliki peran yang sangat penting bagi keteraturan dan perubahan masyarakat. Tokoh mempengaruhi alur sejarah melalui narasinya membentuk pola pikir atau menciptakan manusia-manusia penggerak. Gerakan berkontribusi mewarnai panggung sejarah lewat kiprahnya sebagai kendaraan terjadinya peristiwa. Sedangkan partai politik merupakan aktor utama yang mengawal narasi-narasi tersebut terlaksana dalam ranah yang nyata.

Hasan Al Banna merupakan pendiri dari gerakan Islam di Mesir, Ikhwanul Muslimun pada bulan Maret 1928 M.<sup>1</sup> Ikhwanul Muslimun. Pemikiran yang dikembangkan oleh Hasan Al Banna melalui Ikhwanul Muslimun memberikan perhatian yang penuh terhadap pembinaan individu, perbaikan masyarakat, hingga kepedulian terhadap persoalan di negeri-negeri kaum muslimin yang dibingkai oleh paradigma Islam.<sup>2</sup>

Islam menurut pemikiran Hasan Al Banna merupakan sistem yang menyeluruh, mencakup seluruh aspek kehidupan, yakni mencakup negara dan tanah air; pemerintahan dan umat; moral dan kekuatan; kasih sayang dan keadilan; wawasan dan undang-undang; ilmu pengetahuan dan hukum; materi dan kekayaan alam; jihad dan dakwah; sebagaimana juga Islam adalah akidah yang murni dan ibadah yang benar, tidak kurang tidak lebih.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Hasan Al Banna, *Majmuatur Rasail Kumpulan Risalah Dakwah Jilid 1*, terjemahan oleh Khozil Abu Faqih, Lc., (Jakarta: Al I'tishom, 2012), 180.

<sup>2</sup> Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Al Fiqhu As Siyasi Indal Al Imam Assyahid Hasan Al Banna*, terjemahan oleh Bimawan, (Solo: Media Insani Publishing, 2011), 10.

<sup>3</sup> Hasan Al Banna, *Majmuatur Rasail Kumpulan Risalah Dakwah Jilid 1*, terjemahan oleh Khozin Ab Faqih, Lc., (Jakarta: Al I'tishom, 2012), 291-292.

Dalam tulisannya yang lain, Hasan Al Banna kembali menengaskan mengenai Islam, bahwa Islam mencakup akidah dan ibadah; negara dan kewarganegaraan; toleransi dan kekuatan; moral dan materi; kebudayaan dan undang-undang. Setiap muslim dituntut untuk peduli pada setiap persoalan umatnya.<sup>4</sup>

Metode tarbiyah merupakan salah satu buah pemikiran yang diperkenalkan oleh Hasan Al Banna. Metode tarbiyah ini berusaha menggabungkan unsur-unsur keimanan yang benar yang diunggulkan oleh ahli kalam, kaum sufi, dan para ulama fiqih, menyegarkan nilai-nilai iman yang ditelantarkan oleh kaum muslimin pada masa kini. Dengan kata lain metode tarbiyah merupakan suatu upaya pembinaan bagi kaum muslimin sebagaimana Hasan Al Banna memahami kedudukan iman dalam Islam, di mana iman bukan sekadar pengetahuan intelektual seperti pengetahuan para ahli ilmu kalam, bukan sekadar cita rasa ruhani seperti cita rasa kaum sufi, bukan pula sekadar pengamalan ritual ibadah seperti yang dilakukan oleh para ahli zuhud. Iman yang hakiki, menurut Hasan Al Banna, adalah menggabungkan seluruh unsur tersebut, tetapi terbebas dari kerancuan yang berlebihan atau pengabaian, di samping semangat dinamis untuk memakmurkan bumi dengan kebenaran, mengisi kehidupan dengan kebaikan, dan membimbing manusia menuju kebenaran.<sup>5</sup>

Dalam praktiknya, konsep tarbiyah yang diterapkan Hasan Al Banna menjadi suatu pembinaan yang berkelanjutan bagi setiap individu muslim pada umumnya dan khususnya di kalangan pergerakan Ikhwanul Muslimun. Melalui pijakan *Rabbaniyah*, Hasan Al Banna berupaya membina kaum muslimin agar senantiasa menghidupkan hatinya dan menyucikan jiwanya, melalui usaha untuk selalu berhubungan dengan Allah *subhanahu wa ta'ala*. Pendekatan tarbiyah ini pada dasarnya merupakan pendekatan tasawuf, Hasan Al Banna menyebutnya sebagai *'ulum at tarbiyah wa as suluk* (ilmu pembinaan dan perilaku). Suatu hal

---

<sup>4</sup> Hasan Al Banna, *Majmuatu Rasail Kumpulan Risalah Dakwah Jilid 3*, terjemahan oleh Asep Sobari, (Jakarta: Al I'tishom, 2012), 253.

<sup>5</sup> Yusuf Qaradhawi, *Tarbiyah Hasan Al Banna dalam Jamaah Al Ikhwan Al Muslimun*, terjemahan oleh Asep Sobari, Lc., (Jakarta: Robbani Press, 2005), 16-17.

yang tidak aneh mengingat Hasan Al Banna sendiri sebelum mendeklarasikan gerakan Ikhwanul Muslimun telah berkecimpung dalam tasawuf pada waktu menempuh pendidikan di Damanhur.<sup>6</sup>

Pemikiran etika politik Hasan Al Banna diwarnai oleh nilai-nilai Islam yang kental.<sup>7</sup> Berbeda dengan kalangan sekular, Hasan Al Banna tidak memisahkan persoalan agama dengan persoalan politik, bahwa pembatasan dan pemisahan politik dari Islam itu tidak diakui.<sup>8</sup> Secara tegas, Hasan Al Banna menyatakan, politik pemerintahan merupakan bagian dari agama, di antara kewajiban seorang muslim adalah memberi perhatian terhadap permasalahan pemerintahan, sebagaimana dia wajib memperhatikan permasalahan ruhiyah.<sup>9</sup>

Pada bulan Januari 1941, Mukhtar Ikhwanul Muslimun yang keenam mengeluarkan rekomendasi kepada Maktab Irsyad atau Kantor Pusat Ikhwanul Muslimun, untuk mencalonkan kader-kader Ikhwan terbaik agar duduk di berbagai lembaga perwakilan. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pendapat jamaah terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan agama dan bangsa. Hasan Al Banna terpilih sebagai calon anggota legislatif dalam pemilihan umum 1942. Namun kemenangannya dianulir pemerintah Mesir melalui Perdana Menteri An Nahhas Pasha dan penjajah Inggris dan menyarakannya supaya mengundurkan diri. Hasan Al Banna menerima keputusan itu dengan syarat penghapusan prostitusi ilegal, kewajiban menggunakan bahasa Arab di seluruh perusahaan, memberi keleluasaan kepada Ikhwan dalam beraktifitas dan mengizinkan Ikhwan menerbitkan surat kabar untuk kalangan internal. Pada Masa

---

<sup>6</sup> Hasan Al Banna, *Mudzakkiratud Da'wah wad Da'iyah*, terjemahan oleh Salafuddin dan Hawin Murtadho, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2013), 23.

<sup>7</sup> Hasan Al Banna, *Majmuatur Rasail Kumpulan Risalah Dakwah Jilid 2*, terjemahan Khozin Abu Faqih, Lc., dan Burhan, MA., (Jakarta: Al I'tishom, 2012), 15.

<sup>8</sup> Hasan Al Banna, *Majmuatur Rasail Kumpulan Risalah Dakwah Jilid 3*, terjemahan asep Sobari, (Jakarta: Al I'tishom, 2012), 254.

<sup>9</sup> Hasan Al Banna, *Majmuatur Rasail Kumpulan Risalah Dakwah Jilid 3*, terjemahan asep Sobari, (Jakarta: Al I'tishom, 2012), 264.

pemerintahan selanjutnya yakni di bawah Ahmad Mahir, Hasan Al Banna kembali terpilih sebagai anggota parlemen Mesir.<sup>10</sup>

Gerakan yang didirikan oleh Hasan Al Banna tersebut terus tumbuh, dalam perkembangannya kemudian berkontribusi dan mempengaruhi lebih di 70 negara dunia<sup>11</sup>.

Hasan Al Banna memiliki pengaruh terhadap perkembangan gerakan Islam di Indonesia, dia mendukung usaha-usaha kemerdekaan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Beberapa tokoh sentral di awal-awal masa kemerdekaan Indonesia seperti Perdana Menteri Sutan Sjahrir, dan Menteri Muda Luar Negeri Haji Agus Salim pernah bertemu dengan Hasan Al Banna dan berdialog secara intensif mengenai kemerdekaan Indonesia dan keadaan negeri-negeri muslim yang pada saat itu sedang berada dalam cengkeraman penjajahan.<sup>12</sup> Namun herannya, dalam periode gerakan kebangkitan kesadaran nasional Indonesia (1900-1942 M), hingga fase usaha-usaha mempertahankan kemerdekaan atau pertempuran fisik dan diplomasi (1945-1949 M), sejarawan umumnya menuliskan kebanyakan organisasi sosial pendidikan dan politik Islam di Indonesia itu dipengaruhi oleh Pan-Islamisme yang di bawa oleh Jamaluddin Al Afghani, jarang sekali nama Hasan Al Banna disebutkan. Hasan Al Banna membangkitkan solidaritas muslim dengan ajakan kembali ke ajaran Islam yang dibawakan oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Al Banna membangkitkan semangat persatuan guna melawan penjajah Barat melalui organisasi yang didirikannya yakni Ikhwanul Muslimun.<sup>13</sup>

Apabila dilihat dalam konteks jalur masuknya ke Indonesia, pemikiran Hasan Al Banna berkembang di Indonesia melalui beberapa pintu masuk.

---

<sup>10</sup> Hasan Al Banna, *Majmuatur Rasail Kumpulan Risalah Dakwah Jilid 4*, terjemahan Khozin Abu Faqih, Lc., dkk, (Jakarta: Al I'tishom, 2013), 133.

<sup>11</sup> Rahmat Abdullah dalam Pengantar buku *Mudzakkiratud Da'wah wad Da'iyah*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2013), hal. V, dia merujuk pada pendapat Yusuf Qaradhawi seorang cendekiawan muslim kontemporer kenamaan.

<sup>12</sup> M. Zein Hasan, *Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri*, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1980), 220, dan 277.

<sup>13</sup> Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah Jilid 1*, (Bandung: Salamadani, 2009), 319-323.

*Pertama*, Suherman dalam pengantar buku *Dari Gerakan ke Negara* menyampaikan, banyak teori yang dikemukakan berkenaan dengan akar atau mengapa gerakan ini muncul di Indonesia. Dia mengutip dua pendapat yaitu pendapat Ali Said Damanik dan Eef Saefullah Fatah. Ali Said Damanik misalnya mengatakan, gerakan ini muncul sebagai respon dari sistem politik Orde Baru yang represif terhadap Islam dan tersedianya ruang publik yang lapang yang memungkinkan sebuah idealisme mengalami persemaian secara cepat. Sedangkan Eef Saefullah Fatah berpendapat bahwa gerakan ini muncul sebagai akibat dari akses pendidikan politik Orde Baru yang tertutup yang menimbulkan banyak kekecewaan, hasil dari transformasi ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai ekspresi dari kekecewaan terhadap politik pembangunan yang menimbulkan disparitas sosial yang parah. Berpijak dari pendapat tersebut, Suherman menyimpulkan bahwa kemunculan gerakan ini sebagai perlawanan terhadap konspirasi internasional yang ingin menghancurkan Islam atau merupakan respon terhadap adanya benturan peradaban (*clash of civilization*) sebagaimana tesisnya Samuel P. Huntington yang terkenal itu.<sup>14</sup>

*Kedua*, hubungan bilateral Indonesia dengan Arab Saudi dalam bidang pendidikan. Di mulai dari pengiriman pelajar-pelajar Indonesia ke Timur Tengah terutama Arab Saudi pada permulaan tahun 1950-an sampai tahun 1960-an. Ketika itu, negara Arab Saudi tengah melakukan reformasi pendidikan. Di waktu yang sama, kalangan intelektual Ikhwanul Muslimun banyak yang meninggalkan Mesir akibat persekusi dari rezim Gamal Abdul Nasser. Para intelektual ini diterima dengan baik oleh Raja Faisal dan mempercayakan reformasi pendidikan di tangan intelektual Ikhwanul Muslimun. Abu Ridho<sup>15</sup> mengatakan pada waktu itu, di perpustakaan kampus-kampus Arab Saudi banyak ditemukan literatur-literatur karangan penulis Ikhwanul Muslimun sehingga menjadi konsumsi bacaan yang umum di kalangan mahasiswa. Lebih lanjut dari hubungan ini, kerajaan

---

<sup>14</sup> Suherman dalam pengantar buku Anis Matta, *Dari Gerakan ke Negara*, (Bandung: Fitrah Rabbani, 2006), xix.

<sup>15</sup> Priandoko, *Jurnal: Pengaruh Pemikiran Politik Hasan Al Banna terhadap Partai Keadilan Sejahtera Pasca Reformasi di Indonesia Tahun 1998-2004*, (Universitas Riau: Jom FISIP vol. 2 no. 1, Februari 2015), 3.

Arab Saudi kemudian mendirikan lembaga pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) di Jakarta pada 1980. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, para pengajar di LIPIA kebanyakan dipengaruhi oleh gagasan dan pemikiran Hasan Al Banna. Koleksi buku di perpustakaan LIPIA juga sebagian ditulis oleh ideolog-ideolog Ikhwanul Muslimun. Mahfudz Sidiq mengatakan bahwa LIPIA berperan penting dalam menyebarkan bukan hanya pemikiran melainkan juga model gerakan Ikhwanul Muslimun di Indonesia.<sup>16</sup>

*Ketiga*, ketika Mohammad Natsir mendirikan partai yang memiliki ideologi mirip dengan yang dikembangkan oleh Hasan Al Banna, yaitu Partai Masyumi pada 7 November 1945 dengan menjadikan gerakan Ikhwanul Muslimun sebagai sumber inspirasi. Kemudian, ketika partai tersebut akhirnya dibubarkan oleh Soekarno serta dilarang hidup kembali oleh Soeharto kemudian, para aktivis partainya mengalihkan perhatian pada aktifitas dakwah dan pendidikan, dengan mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada 1967.<sup>17</sup>

Kontribusi paling penting dari DDII yaitu melakukan pembinaan (tarbiyah), pengkaderan, pengiriman para Da'i ke berbagai pelosok desa, mendorong para siswa Indonesia untuk studi ke negara-negara di Timur Tengah melalui pengelolaan dana beasiswa yang dikelola dari Liga Dunia Islam atau *Rabithah Al Alam Al Islami*, membangun basis-basis kekuatan umat Islam. Masjid, kampus dan pesantren menjadi basis-basis pengkaderan umat; menjadi kawah candradimuka kader-kader militan, da'i-da'i mumpuni, yang bergerak melakukan perubahan-perubahan di masyarakat.<sup>18</sup> Di kampus-kampus, pemikiran Hasan Al Banna terus berkembang memberikan nilai-nilai yang baru kepada mahasiswa muslim melalui para mahasiswa yang telah pulang dari Timur Tengah ataupun melalui jalur akademisi Malaysia lewat Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) yang sudah berupaya dengan sungguh-sungguh menerjemahkan literasi-literasi

---

<sup>16</sup> Burhanudin Muhtadi, *Dilema PKS: Suara dan Syariah*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), 99.

<sup>17</sup> Priandoko, *Jurnal: Pengaruh Pemikiran Politik Hasan Al Banna terhadap Partai Keadilan Sejahtera Pasca Reformasi di Indonesia Tahun 1998-2004*, (Universitas Riau: Jom FISIP vol. 2 no. 1, Februari 2015), 3.

<sup>18</sup> Artawijaya, *Belajar dari Partai Masjumi*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2014), 32.

pemikiran Hasan Al Banna ke dalam bahasa Melayu, sehingga mahasiswa kampus-kampus umum yang tidak memiliki kemampuan berbahasa Arab sangat terbantu dengan kehadiran buku-buku tejemahan tersebut. Buku-buku tersebut kemudian dibawa ke Indonesia lewat pengajar-pengajar Indonesia yang menjadi dosen di Malaysia.<sup>19</sup> Penekanan utama dari dakwah tersebut ialah kesalihan personal dan kesalihan sosial sehingga menumbuhkan kesadaran akan perilaku yang Islami. Ide-ide kesempurnaan Islam yang diserukan oleh Hasan Al Banna menunjukkan keyakinan terhadap Islam sebagai suatu sistem hidup yang lengkap menjadi seruan utama gerakan ini yang kemudian bertransformasi menjadi Gerakan Tarbiyah.

Gerakan Tarbiyah mengambil permulaannya dari *halaqah-halaqah* yang berkesinambungan kemudian konsisten pada penerapan prinsip pemikiran Hasan Al Banna, yaitu bahwa nilai-nilai Islam merupakan nilai yang universal dan konsep Islam merupakan konsep yang sempurna dan merupakan bagian yang integral bagi kehidupan setiap muslim. Gerakan Tarbiyah pada tataran praktis menggunakan dua jalur strategis, yakni pertama dalam bidang kemahasiswaan dan kedua dalam bidang politik.<sup>20</sup> Hasan Al Banna memberikan perhatian khusus kepada pemuda, yakni pelajar dan mahasiswa untuk mengemban dakwah Islam. Dalam sudut pandang Hasan Al Banna, mereka merupakan aset penting dan penggerak dari dakwah itu sendiri. Al Banna selalu menekankan kepada mereka untuk selalu berpijak kepada fikrah Islam yang hanif, melalui landasan Al Quran yang suci. Mereka ini senantiasa menyambut dakwah dengan bahagia. Baginya, mereka adalah pilar kebangkitan setiap umat, rahasia dalam kebangkitan dan pengibar panji setiap fikrah.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Priandoko, *Jurnal: Pengaruh Pemikiran Politik Hasan Al Banna terhadap Partai Keadilan Sejahtera Pasca Reformasi di Indonesia Tahun 1998-2004*, (Universitas Riau: Jom FISIP vol. 2 no. 1, Februari 2015), 7.

<sup>20</sup> Esti Darmawati, *Jurnal: Aktivitas Mahasiswa Kelompok Dakwah Tarbiyah Ikhwanul Muslimin*, (Universitas Airlangga: Antrounair vol. 2/no. 1/Jan-Feb 2013), 190.

<sup>21</sup> Hasan Al Banna, *Majmuatur Rasail Kumpulan Risalah Dakwah Jilid 1*, terjemahan Khozin Abu Faqih, Lc., (Jakarta: Al I'tishom, 2012), 71.

Pembinaan-pembinaan keislaman yang dilakukan di lingkungan masjid kampus terus berjalan seiring dengan kebijakan normalisasi kegiatan kampus. Program yang dibangun dari unsur pemikiran Hasan al-Banna, seperti pentingnya kaderisasi yang disiplin, dan mempersiapkan mahasiswa untuk berkecimpung dalam dakwah dan aktivisme dengan model baru. Aktivitas dakwah kampus tersebut terus berkembang sepanjang 1980-an dan 1990-an dalam gerakan atau jamaah Tarbiyah dengan struktur organisasi utamanya adalah usrah.

Setelah kejatuhan era presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, kalangan gerakan atau jamaah Tarbiyah menghimpun barisan dan mendirikan Partai Keadilan di lapangan Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru pada 20 Juli 1998.<sup>22</sup> Partai Keadilan ini disebut oleh Yusuf Qaradhawi dalam catatan akhir abad ke-20 nya sebagai transformasi gerakan Ikhwanul Muslimun di Indonesia.<sup>23</sup>

Pada partisipasi pertamanya dalam pemilihan umum 1999, Partai Keadilan menduduki peringkat ketujuh dengan mendulang 1.436.565 suara. Akan tetapi perolehan tersebut gagal mengantarkan Partai Keadilan melewati ambang batas atau *threshold*.<sup>24</sup> Namun demikian, angka di atas satu juta tersebut mengindikasikan kematangan dan keberhasilan proses pembinaan di masyarakat yang telah dilakukan oleh gerakan Tarbiyah sejak tahun 1980-an tersebut.

Dalam periode Partai Keadilan ini, terjadi suatu hal menarik mengenai pembahasan Syariat Islam yaitu wacana pengembalian Piagam Jakarta. Partai Keadilan dalam pandangan terakhirnya menolak pembahasan yang terlalu jauh mengenai pengembalian Piagam Jakarta dan penegakkan syariat Islam di Indonesia.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Yanuardi Sukur, *Tikar Pak Hidayat*, (Yogyakarta: Giga Pustaka, 2014), 40.

<sup>23</sup> Sri Herwindya Baskara Wijaya, *Komunikasi Politik Partai Terbuka ala PKS*, jurnal ini diakses pada laman [https://eprints.uns.ac.id/11618/1/Publikasi\\_Jurnal\\_\(45\).pdf](https://eprints.uns.ac.id/11618/1/Publikasi_Jurnal_(45).pdf) tanggal 6 Juni 2018, pukul 16.31 wib.

<sup>24</sup> Rumah Pemilu, *Hasil Pemilu Tahun 1999*, dengan sumber mengutip dari Wijanarko Puspoyo, Dari Soekarno Hingga Yudhoyono: Pemilu Indonesia 1955-2009.

<sup>25</sup> Akmal Sjafril, *Geliat Partai Dakwah Memasuki Ranah Kekuasaan*, (Jakarta: Afnan Publishing, 2013), 112-113. Akmal mengutip pernyataan dari Untung Wahono dalam *Jawaban Soal*



Dengan munculnya jawaban tersebut, bukan berarti Partai Keadilan menolak syariat Islam, Abu Ridho mengatakan hal itu sebagai suatu langkah yang lebih maju, karena dapat melihat realitas masyarakat yang sebenarnya dan mulai membenahi menegakkan syariat sejak dalam dirinya sendiri.<sup>26</sup>

Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan yang tidak berhasil melewati ambang batas memutuskan mengubah nama dan lambang partai agar bisa berpartisipasi dalam pemilu 2004.<sup>27</sup>

Dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Bali pada 1-3 Februari 2008, mulai muncul wacana PKS sebagai partai terbuka. Wacana tersebut akhirnya disahkan secara legal formal dalam Musyawarah Nasional Ke-2 Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 16-20 Juni 2010 di Jakarta, di mana salah satu ketetapanannya adalah menjadikan PKS sebagai partai terbuka (inklusif). Di antara orientasi yang ditonjolkan dari pilihan terbuka ini adalah mencoba melegalformalkan keanggotaan kalangan nonmuslim. Hal ini didasarkan atas pertimbangan signifikansi dukungan sebagian kalangan nonmuslim di wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya nonmuslim terutama di kawasan Indonesia Timur seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur.<sup>28</sup>

Pilihan dari gerakan atau jamaah Tarbiyah untuk masuk ke dalam politik praktis dalam sistem demokrasi, sedikit berbeda dengan beberapa gerakan Islam lainnya yang lebih memilih berkiprah di luar parlemen seperti Front Pembela Islam (FPI), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Akan tetapi, langkah yang dilakukan oleh gerakan ini bukan tanpa alasan dan pijakan. Sebagaimana ideologi mereka yang dipengaruhi oleh pemikiran Hasan Al Banna dan Ikhwanul

---

*Penegakkan Syariat Islam dalam Partai Keadilan Sejahtera Menjawab Tudingan dan Fitnah*, (Jakarta: Pustaka SAKSI, 2004), 16.

<sup>26</sup> Akmal Sjafril, *Geliat Partai Dakwah Memasuki Ranah Kekuasaan*, (Jakarta: Afnan Publishing, 2013), 113. Akmal mengutip pernyataan dari Abu Ridho dalam *Semua Isu itu Tidak Bernilai dalam Partai Keadilan Sejahtera Menjawab Tudingan dan Fitnah*, (Jakarta: Pustaka SAKSI, 2004), 69.

<sup>27</sup> Erfina Nursa'adah dan Suwandi Sumartias, *Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Keterbukaan Ideologi*, (Jurnal Kajian Komunikasi volume 5 no. 1, Juni 2017), 44.

<sup>28</sup> Sri Herwindya Baskara Wijaya, *Komunikasi Politik Partai Terbuka ala PKS*, jurnal ini diakses pada laman [https://eprints.uns.ac.id/11618/1/Publikasi\\_Jurnal\\_\(45\).pdf](https://eprints.uns.ac.id/11618/1/Publikasi_Jurnal_(45).pdf) tanggal 6 Juni 2018, pukul 16.31 wib.

Muslimun, keterlibatan gerakan dalam sistem juga sudah dilakukan oleh Ikhwanul Muslimun ketika Hasan Al Banna masih hidup.<sup>29</sup>

Penelitian ini akan memusatkan perhatian pada pengaruh dari etika politik Hasan Al Banna dalam kiprahnya bersama gerakan Ikhwanul Muslimun, di mana di dalamnya juga terkandung nilai-nilai yang fundamental seperti etika politik dan tarbiyah Islamiyah terhadap etika politik Partai Keadilan Sejahtera sejak tahun 2004 sampai 2014, dengan diberi judul *Etika Politik Hasan Al Banna dan Pengaruhnya Terhadap Partai Keadilan Sejahtera tahun 2004-2014*.

## **B. Rumusan Masalah**

Di antara pemikiran-pemikiran yang menonjol dari Hasan Al Banna ialah mengenai tarbiyah dan politik. Pendekatan Hasan Al Banna mengenai hal ini sangat moderat, sederhana dan menyeluruh sehingga mudah diadopsi atau dipraktikkan oleh siapapun yang sudah mengenal pemikirannya. Setelah mengamati narasi dan menyisirnya secara mendalam mengenai Hasan Al Banna dan Partai Keadilan Sejahtera, diketahui ada silsilah pemikiran atau silsilah ideologis yang beririsan dengan pemikiran Hasan Al Banna tersebut. Dalam penelitian ini, rumusan masalahnya dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang pemikiran etika politik Hasan Al Banna?
2. Bagaimana pengaruh etika politik Hasan Al Banna terhadap Etika Politik Partai Keadilan Sejahtera tahun 2004-2014

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang magister dalam program pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, di konsentrasi jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, selain itu penelitian ini memiliki tiga tujuan lain yang juga penting, yaitu:

---

<sup>29</sup> Akmal Sjafril, *Geliat Partai Dakwah Memasuki Ranah Kekuasaan*, (Jakarta: Afnan Publishing, 2013), 184.

1. Mengetahui latar belakang kehidupan Hasan Al Banna untuk melacak pengaruh-pengaruh yang membentuk pola pikir dari Hasan Al Banna. Baik dari dirinya sendiri, keluarganya, lingkungan sekitar, kondisi yang terjadi pada saat itu, maupun kawan-kawan dan lawan-lawan yang membuatnya mencetuskan pemikiran-pemikiran.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh etika politik Hasan Al Banna yang mewarnai Etika Politik Partai Keadilan Sejahtera sepanjang kurun waktu 2004-2014.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian mengenai Etika Politik Hasan Al Banna dan Pengaruhnya Terhadap Partai Keadilan Sejahtera tahun 2004-2014 merupakan penelitian yang memiliki manfaat praktis yaitu untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman dan pengaruh yang dibawa oleh Hasan Al Banna.

Di sisi lain, manfaat teoritis dari penelitian mengenai pemikiran-pemikiran Hasan Al Banna tersebut dan pengaruhnya terhadap Partai Keadilan Sejahtera diharapkan dapat menjadi suatu sumbangan konseptual yang berharga dalam studi pemikiran tokoh dan gerakan Islam bagi dunia akademis di Indonesia

#### **E. Landasan Teoritis Sosial-Humaniora**

Kerangka teoritis merupakan unsur penting supaya penelitian ini berbasiskan teori yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis. Dapat dikatakan, kerangka teoritis adalah aspek fundamental bagi seorang peneliti untuk mengambil langkah yang tepat terkait objek penelitiannya. Dalam penelitian Etika Politik Hasan Al Banna dan Pengaruhnya Terhadap Partai Keadilan Sejahtera tahun 2004-2014, penulis menggunakan pendekatan-pendekatan sosiologi dan psikologi sosial.

Dalam mengupas bagaimana proses terbentuknya pemikiran-pemikiran Hasan Al Banna, penulis memanfaatkan pendekatan sosialisasi dan teori peran (*sosialization and role theory*). Dalam sosialisasi dan teori peran akan diperoleh

unsur-unsur yang melatarbelakangi lahirnya pemikiran Hasan Al Banna. Adapun untuk mengupas bagaimana proses pengaruh pemikiran Hasan Al Banna terhadap Partai Keadilan Sejahtera penulis memanfaatkan pendekatan kelompok sosial.

Charlotte Buehler mendefinisikan sosialisasi sebagai proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup dan berfikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya.<sup>30</sup> Menurut Richard T. Schaefer proses sosialisasi yang terus berlanjut sepanjang hidup melibatkan banyak kekuatan sosial yang berbeda yang mempengaruhi kehidupan dan citra diri seseorang.<sup>31</sup>

Peter Berger mendefinisikan sosialisasi sebagai proses melalui mana seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat.<sup>32</sup> Apa yang dipelajari seseorang dalam proses sosialisasi? Menurut Berger, yang diajarkan melalui sosialisasi ialah peran-peran. Oleh sebab itu teori sosialisasi menurut sejumlah tokoh sosiologi merupakan teori mengenai peran (*role theory*). Dalam proses ini seseorang belajar untuk mengetahui peran yang harus dijalankannya serta peran yang harus dijalankan orang lain. Karena kemampuan seseorang untuk berperan sebagai anggota masyarakat tergantung pada sosialisasi. Oleh karena itu seseorang yang tidak mengalami sosialisasi tidak akan dapat berinteraksi dengan orang lain.<sup>33</sup>

Sosialisasi tidak akan berjalan jika tidak ada peran media sosialisasi. Menurut Schaefer ada beberapa agen yang dapat membentuk pola pikir seseorang yaitu keluarga, sekolah, kelompok pertemanan, tempat tinggal, agama, media massa dan teknologi, serta negara.<sup>34</sup> Sedangkan Elly dan Usman mengemukakan media sosialisasi yang otomatis memiliki peran tersebut adalah lembaga sosial.

---

<sup>30</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana, 2011), 155.

<sup>31</sup> Richard T. Schaefer, *Sociology*, terjemahan oleh Anton Noveanto dan Diah Tantri Dwiandani, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 97.

<sup>32</sup> Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi Edisi Revisi*, (Jakarta: LPFEUI, 2004), 21.

<sup>33</sup> Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi Edisi Revisi*, (Jakarta: LPFEUI, 2004), 21.

<sup>34</sup> Richard T. Schaefer, *Sociology*, terjemahan oleh Anton Noveanto dan Diah Tantri Dwiandani, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 97.

Lembaga sosial adalah alat yang berguna untuk melakukan serangkaian peran yang menanamkan nilai-nilai dan norma-norma sosial. Lembaga sosial tersebut adalah keluarga, lembaga pendidikan, lembaga politik, media massa, lembaga keagamaan, dan lingkungan sosial. Antara lembaga satu dan lembaga sosial dalam kehidupan sosial tidaklah berdiri sendiri, melainkan saling terkait dengan jaringan sistem yang sering disebut dengan sistem sosial. Lembaga-lembaga yang saling berhubungan tersebut memerankan sebagai *agen sosialisasi* atau *media sosialisasi*.<sup>35</sup>

Kelompok sosial merupakan suatu gejala yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena sebagian besar kegiatan manusia berlangsung di dalamnya. Robert Bierstedt menggunakan tiga kriteria untuk membedakan jenis kelompok, yaitu ada tidaknya organisasi, hubungan sosial di antara anggota kelompok, dan kesadaran jenis. Berdasarkan ketiga kriteria tersebut, Bierstedt kemudian membedakan empat jenis kelompok, yaitu kelompok statistik (*statistical group*), kelompok kemasyarakatan (*societal group*), kelompok sosial (*social group*), dan kelompok asosiasi (*associational group*).<sup>36</sup>

Emile Durkheim membedakan kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas mekanik dan kelompok yang didasarkan pada solidaritas organik. Solidaritas mekanik merupakan ciri yang menandai masyarakat yang masih sederhana, yang oleh Durkheim dinamakan segmental. Masing-masing kelompok dapat memenuhi keperluan mereka tanpa memerlukan bantuan atau kerja sama dengan kelompok di luarnya. Peran semua anggota sama sehingga ketidakhadiran seorang anggota kelompok tidak mempengaruhi kelangsungan hidup kelompok karena peran anggota tersebut dapat dijalankan orang lain. Dalam solidaritas mekanik, yang diutamakan ialah persamaan perilaku dan sikap. Perbedaan tidak dibenarkan. Sanksi terhadap pelanggaran hukum di sini bersifat represif. Hukuman terhadap pelanggar aturan bertujuan agar ketidakseimbangan yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut dapat dipulihkan kembali. Solidaritas organik

---

<sup>35</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana, 2011), 176-177.

<sup>36</sup> Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi Edisi Revisi*, (Jakarta: LPFEUI, 2004), 125-126.

merupakan bentuk solidaritas yang mengikat masyarakat kompleks yang telah mengenal pembagian kerja yang rinci dan dipersatukan oleh kesalingtergantungan antarbagian. Tiap anggota menjalankan peran berbeda, dan di antara berbagai peran yang ada terdapat kesalingtergantungan. Karena itu, ketidakhadiran pemegang peran tertentu akan mengakibatkan gangguan pada kelangsungan hidup masyarakat.<sup>37</sup>

## F. Kajian Pustaka

Tesis Burhanudin Muhtadi di The Australian National University (ANU) berjudul “Thinking Globally, Acting Locally: Analyzing the Islamist Activism of Indonesia’s Prosperous Justice Party (PKS) from a Social Movement Theory Perspective” yang kemudian sebagian sub-tesisnya dibukukan dengan judul *Dilema PKS: Suara dan Syariah*<sup>38</sup> merupakan suatu kajian yang menarik menggunakan teori-teori gerakan sosial sebagai pendekatan dalam menganalisa perjalanan sejarah PKS sekaligus tantangan masa depannya.

Nandang Burhanudin pada tesisnya di Universitas Indonesia yang kemudian dibukukan dengan judul “Penegakan Syariat Islam menurut Partai Keadilan”<sup>39</sup>. Nandang mengamati Partai Keadilan (PK) sebagai sebuah kendaraan politik yang formal untuk melakukan upaya penerapan syariat Islam dalam kerangka dan proses yang demokratis.

Firman Noor dalam tesisnya di The Australian National University (ANU) tahun 2006 berjudul “Moderate Islamic Fundamentalism: A Study of Political Thinking and Behavior of the Prosperous Justice Party (PKS), 1999-2005” memberikan kesimpulan bahwa pada hakikatnya PKS merupakan partai yang moderat, mau beroperasi dalam koridor konstitusi demokrasi serta menolak langkah-langkah kekerasan untuk mewujudkan cita-cita politiknya.

---

<sup>37</sup> Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi Edisi Revisi*, (Jakarta: LPFEUI, 2004), 128.

<sup>38</sup> Buku ini diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, tahun 2012.

<sup>39</sup> Buku ini diterbitkan oleh Al Jannah Pustaka, Jakarta, tahun 2004.

Yon Machmudi dalam disertasinya di The Australian National University (ANU) tahun 2006 berjudul, “Islamising Indonesia The Rise of Jemaah Tarbiyah and Prosperous Justice Party” merupakan salah seorang deklarator Partai Keadilan menerapkan label “santri global” untuk menggambarkan karakteristik pendukung PKS. Dia mengambil fokus kajian pada asal-usul, ideologi, dan pengaruh PKS terhadap Islam di Indonesia. dia memberi kesimpulan bahwa PKS tidak berupaya mengusung penerapan syariat melainkan mencoba merevisi citra dengan mencurahkan energi partai pada isu-isu kesejahteraan dan keadilan.

Selain itu ada beberapa artikel atau jurnal yang menarik mengenai Hasan Al Banna dan PKS, antara lain:

Zaeny, *Hasan Al Banna dan Strategi Perjuangannya*, dalam Jurnal Al Adyan vol. VI no. 02 bulan Juli-Desember 2011. Tulisan ini menekankan pada kiprah Hasan Al Banna dan strategi perjuangannya dalam membumikan gagasan/pemikiran dakwahnya di masyarakat Mesir khususnya, serta dunia Islam pada umumnya melalui gerakan Ikhwanul Muslimun yang didirikan olehnya.

Otoman, *Pemikiran Politik Hasan Al Banna dan Pembentukan Radikalisme Islam*, dalam Jurnal Tamaddun vol XV, No. 1, Januari-Juni 2015. Tulisan ini memfokuskan pada narasi pembentukan pemahaman radikal di kalangan kaum muslimun yang diduga turut mendapat pengaruhnya dari pemikiran Hasan Al Banna bersama Ikhwanul Muslimun. Di dalamnya juga termasuk dinarasikan tentang bagaimana pemikiran-pemikiran yang mempengaruhi Hasan Al Banna termasuk keterlibatannya di dalam dunia tarikat Hashafiyah.

Priandoko, *Pengaruh Pemikiran Politik Hasan Al Banna Terhadap Partai Keadilan Sejahtera Pasca Reformasi di Indonesia tahun 1998-2004*, dalam Jurnal Jom FISIP volume 2 no. 1, Februari 2015. Tulisan ini memfokuskan pada pengaruh Hasan Al Banna terhadap PKS dan juga peta masuknya pemikiran Hasan Al Banna ke Indonesia termasuk ke dalam organisasi mahasiswa Islam.

Febrian Taufiq Sholeh, *Manhaj Tarbiyah dalam Pendidikan Politik Kader PKS*, dalam Jurnal Salam volume 18 no. 1 Juni 2015. Tulisan ini memaparkan

konsep pembinaan atau tarbiyah di kalangan Partai Keadilan Sejahtera dengan berpijak kepada manhaj yang diperkenalkan oleh Hasan Al Banna.

Muhammad Misbah, *Kontribusi Imam Asy Syahid Hasan Al Banna Terhadap Pemikiran Islam Modern*, dalam Jurnal Fikrah, volume 3, no 2, Desember 2015. Tulisan ini mengemukakan tentang pikiran-pikiran Hasan Al Banna yang mewarnai pemikiran Islam modern melalui kajian yang bersifat deskriptif analisis dalam bidang aqidah, fiqih, ekonomi dan politik.

Rosmala Dewi, *Pemikiran Politik Hasan Al Banna*, dalam Jurnal Nurani, vol 15, no 2, Desember 2015. Tulisan ini memaparkan tentang sepak terjang politik yang dilalui oleh Hasan Al Banna beserta kiprah Ikhwanul Muslimun bergelut dalam sistem pemerintahan pada saat itu.

Abdul Mujib, *Pemimpin Perspektif Hasan Al Banna*, dalam Jurnal An Nur, vol 2, no. 1, Januari-Juni 2016. Tulisan ini memaparkan mengenai karakteristik kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Hasan Al Banna ketika memimpin pergerakan Ikhwanul Muslimun.

Yuni Fadilah Rahmi, *Pemikiran Politik dan Dakwah Hasan Al Banna*, dalam Jurnal Manthiq Volume 2, nomor 1, Mei 2017. Tulisan ini mengetengahkan gagasan dakwah dan politik yang dibawa oleh Hasan Al Banna, serta kontribusinya bersama Ikhwanul Muslimun dalam menggalang dukungan atas kemerdekaan yang diperoleh Indonesia pada waktu itu.

Erfina Nursa'adah dan Suwandi Sumartias, *Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Keterbukaan Ideologi*, dalam Jurnal Kajian Komunikasi volume 5 no. 1, Juni 2017. Tulisan ini mengkaji komunikasi yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera pasca pernyataan partai sebagai partai terbuka tahun 2008.

Ridwan, *Hubungan Islam dan Politik di Indonesia Perspektif Pemikiran Hasan Al Banna*, dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 12, nomor 2, Juli-Desember 2017. Tulisan ini menekankan pada pemikiran Hasan Al Banna



khususnya di bidang politik dan cara pandangnya terhadap Islam. Gagasan-gagasan yang dilontarkan oleh Hasan Al Banna ditemukan pengaruhnya di Indonesia sejak masa pergerakan kemerdekaan dan terus berlanjut sampai pada pencarian bentuk ideal negara Indonesia.

Umi Din Nurzanah Br. Sembiring, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hasan Al Banna*, dalam Jurnal Al Lubb, vol 2, no 1, tahun 2017. Tulisan ini mengungkapkan sisi-sisi kemanusiaan dari seorang Hasan Al Banna dan bagaimana pembelaan-pembelaan Al Banna terhadap penindasan yang waktu itu sedang ada pada puncak kolonialisme.

Afriza Hanifa, *Peran Strategis Lembaga Dakwah Kampus*, dalam Harian Republika 22 Februari 2014. Tulisan ini mengetengahkan mengenai peranan yang dipikul oleh FSLDK dan kontribusi aktifnya untuk Indonesia.

Sri Herwinda Baskara Wijaya, *Komunikasi Politik Terbuka ala PKS*, publikasi jurnal UNS. Tulisan ini menyoroti gaya komunikasi yang dilakukan oleh PKS beserta kadernya dan melakukan kajian mendalam tentang pokok-pokok alasan PKS memilih jalan sebagai partai terbuka.

Firman Noor, *Faksi dalam PKS*, tulisan ini dimuat dalam laman website LIPI, menyoroti soal isu keberadaan faksi-faksi di dalam tubuh Partai Keadilan Sejahtera dan pengaruhnya terhadap gerak-gerik partai tersebut.

Ketiadaan kajian yang komprehensif mengenai relasi pemikiran Hasan Al Banna dan PKS di bidang sejarah kebudayaan Islam yang menggunakan pendekatan sosiologi dan psikologi sosial mendorong penulis untuk melakukan kajian tersebut. Kajian ini mencoba meramu kepustakaan yang ada dan mengaitkannya dengan suatu penelitian yang lebih menyeluruh, sesuai dengan tradisi intelektual yang telah ada dalam kajian sejarah.

## G. Metode Penelitian

Penelitian sejarah adalah penelitian yang mempelajari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa di masa lampau dengan tujuan utamanya ialah untuk merekonstruksi kembali secara sistematis dan objektif suatu peristiwa atas dasar fakta-fakta yang berhasil dikumpulkan. Kosim, mengutip pendapat Nugroho Notosusanto menyatakan secara sederhana metode sejarah dapat diartikan sebagai prosedur daripada kerja sejarawan untuk menuliskan kisah masa lampau.<sup>40</sup>

Adapun prosedur penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo mempunyai lima tahap yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi dan penulisan.<sup>41</sup> Maka, metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian sejarah yang bersandarkan kepada heuristik, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

### a. Heuristik

Heuristik merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh para sejarawan dalam melakukan tahap penelitian sejarah. Pada tahapan ini, sejarawan mengumpulkan berbagai sumber-sumber data sebagai bahan rujukan penelitian. Kuntowijoyo mengklasifikasikan sumber menurut bahannya menjadi dua yaitu sumber tertulis dan tidak tertulis.<sup>42</sup> Sumber tersebut apabila diuraikan lebih lanjut dapat berasal dari buku, dokumen, arsip, dan juga wawancara.

Selain mengklasifikasikan sumber menurut bahannya, Kuntowijoyo membagi sumber menurut urutan penyampaiannya yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber sejarah disebut primer jika disampaikan oleh saksi mata. Sedangkan, sumber sejarah disebut sekunder apabila disampaikan bukan oleh saksi mata.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Kosim. *Metode Sejarah Asas dan proses*, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 1984), hal. 32.

<sup>41</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995), 67.

<sup>42</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995), 73.

<sup>43</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995), 75.

Dalam pengumpulan sumber terdapat hal yang harus diperhatikan sehingga tidak terjadi kesalahan, seperti kesalahan *holisme* yaitu menganggap bahwa satu bagian yang penting dan pemilihan satu bagian sudah mewakili keseluruhan. Selanjutnya, kesalahan *pragmatis* yaitu kesalahan yang terjadi apabila untuk tujuan tertentu maka memilih sumber yang mendukung tujuan itu, sehingga pengumpulan sumber sering tidak tuntas. Kemudian, terdapat kesalahan *ad hominem* yaitu sejarawan hanya mengumpulkan sumber sejarah dari melihat profesi, otoritas, pangkat atau jabatan. Dalam menghindari kesalahan *ad hominem* dapat dilakukan dengan pengumpulan dari tiga sumber yaitu pihak bersangkutan, pihak lawan dan saksi mata. Sedangkan, kesalahan *kuantitatif* yaitu orang hanya percaya dengan angka-angka, kesalahan estetis terjadi apabila sejarawan hanya mengumpulkan sumber yang hanya mempunyai efek estetis saja.<sup>44</sup>

Sumber-sumber primer dalam penelitian ini antara lain:

1. *Majmuatur Rasail*, ditulis oleh Hasan Al Banna
2. *Mudzakkiratud Da'wah wad Da'iyah*, ditulis oleh Hasan Al Banna
3. Platform Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera
4. Modul Tarbiyah jenjang Muayyid dan Tamhidi
5. Buku Profil Kader Partai Keadilan Sejahtera
6. Buku Manhaj Tarbiyah 1433 H
7. Seri Taujihat Pekan Kader PKS

Sumber-sumber sekunder dalam penelitian ini antara lain:

1. *Haditsul Tsulatsa*: Ceramah-ceramah Hasan Al Banna, penulis Muhammad Isa 'Aasur

---

<sup>44</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995), 132-135.

2. *Ats Tsawabit wal Mutaghayyirat*: Konsep Permanen dan Fleksibel Dakwah Ikhwan, penulis Jum'ah Amin
3. *Fi 'Afaqi Ta'alim*: Studi Analitis Atas Konsep Dakwah Hasan Al Banna dalam Risalah Ta'alim, penulis Sa'id Hawwa
4. *Syarah Risalah Ta'alim*, penulis Muhammad Abdullah Khatib dan Muhammad Abdul Halim Mahmud
5. *Al Ikhwan Al Muslimun Man Nahnu wa Madza Nuridu*: Siapa Kami dan Apa yang Kami Inginkan, penulis Amer Samakh
6. *Masyru' Al Ishlah Al 'Aalami*: Proyek Perbaikan Global dalam Pandangan Hasan Al Banna, penulis Faishal Ash Shafi
7. *Ahadits Al Jumuah*: Ceramah Jumat Hasan Al Banna, penulis Ishom Talimat
8. *Wasailut Tarbiyah 'Inda Ikhwanil Muslimin*: Perangkat-Perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimun, penulis Ali Abdul Halim Mahmud
9. *At Tarbiyatul Islamiyatu wa Madrasatun Hasan Al Banna*: Tarbiyah Hasan Al Banna dalam Jamaah Al Ikhwan Al Muslimun, penulis Yusuf Qaradhawi
10. *Al Fiqhu As Siyasi 'Indal Al Imami Asyahid Hasan Al Banna*: Fiqih Politik Hasan Al Banna, penulis Muhamamd Abdul Qadir Abu Faris
11. *Hikayatun 'Anil Ikhwan*: Ikhwanul Muslimin dalam Kenangan, penulis 'Abbas As Sisiy
12. *Rumah Cinta Hasan Al Banna*, penulis Muhammad Lili Nur Aulia
13. *Delapan Dekade Pergulatan Politik Ikhwanul Muslimin Menuju Kekuasaan*, penulis Ahmad Dzakirin

14. Pilar-Pilar Asasi Bersama Al Haq dan Ahlul Haq, penulis Rahmat Abdullah
15. Dari Gerakan ke Negara, penulis Anis Matta
16. Spiritualitas Kader, penulis Anis Matta
17. Geliat Partai Dakwah Memasuki Ranah Kekuasaan, penulis Akmal Sjafril
18. Mengenal Hasan Al Banna: Intisari Ideologi dan Pemikiran Syaikh Hasan Al Banna, penulis HD Gumilang

Sumber-sumber lainnya adalah sumber wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan mengunjungi para fungsionaris/struktur PKS, termasuk juga mewawancarai para kader, simpatisan hingga orang-orang di luar partai untuk mengemas sudut pandang yang utuh mengenai pengaruh pemikiran Hasan Al Banna terhadap PKS tersebut.

#### **b. Verifikasi atau kritik sumber**

Setelah mengumpulkan sumber, tahap selanjutnya yang dilakukan dalam penelitian sejarah adalah verifikasi atau kritik sejarah (keabsahan sumber). Kuntowijoyo membedakan verifikasi menjadi dua macam yaitu autentisitas atau keaslian sumber (kritis ekstern) dan kredibilitas atau kebiasaan dipercayai (kritik intern). Dalam melakukan kritik ekstern yang perlu diperhatikan adalah otentisitas sumber. Sedangkan, dalam melakukan kritik intern yang harus diperhatikan apakah dokumen itu dapat dipercaya atau kredibilitas sumber. Verifikasi dilakukan untuk semua sumber sejarah yang berhasil dikumpulkan.<sup>45</sup>

Sejarawan harus berusaha menekan subjektivitas dan berusaha untuk menghindari kesalahan dalam menerapkan kritik sejarah. Kesalahan yang dapat terjadi adalah kesalahan *pars pro toto* (menganggap bukti yang berlaku untuk sebagian dianggap berlaku untuk keseluruhan), kesalahan *toto pro pars*

---

<sup>45</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995), 77-78.

(mengemukakan keseluruhannya padahal yang dimaksud adalah bukti untuk sebagian), kesalahan menganggap pendapat umum sebagai fakta, kesalahan menganggap pendapat pribadi sebagai fakta, kesalahan perincian angka yang presis (sejarawan hanya memberikan perkiraan bukan angka yang presis), dan kesalahan bukti yang spekulatif (sejarah sebagai ilmu yang empiris tidak boleh ada bukti diluar jangkauan sejarah).<sup>46</sup>

Dalam kritik ekstern, literatur-literatur asing yang sudah peneliti kumpulkan sebagian besar adalah buku terjemahan, termasuk buku *Mudzakkiratud Da'wah wad Da'iyah*. Kecuali buku *Majmuatu Rasail* yang merupakan buku dua bahasa yakni bahasa Indonesia dan bahasa Arab sekaligus. Namun demikian, buku-buku tersebut merupakan referensi primer yang digunakan dalam dunia pergerakan di Indonesia karena diterjemahkan langsung oleh individu-individu yang berkecimpung dalam dunia pergerakan sehingga otentisitasnya dapat diakui dan tidak jadi masalah.

Hal ini tidak lepas dari tradisi intelektual yaitu budaya menerjemahkan oleh para pelajar yang dikirim ke Timur Tengah ketika mengenalkan gagasan pemikiran Hasan Al Banna ke Indonesia sebagaimana sudah dipaparkan lebih dahulu dalam latar belakang masalah. Misalnya buku *Mudzakkiratud Da'wah wad Da'iyah* yang diterjemahkan menjadi Memoar Hasan Al Banna untuk Dakwah dan Para Da'inya diberi pengantar oleh tokoh generasi awal yang menyebarkan pemikiran Hasan Al Banna dan Ikhwanul Muslimun di Indonesia, di mana atas kontribusinya itu dia diberi gelar *Syaikhut Tarbiyah*, yaitu Rahmat Abdullah.

Adapun buku-buku modul tarbiyah yang digunakan sebagai buku pedoman pembinaan atau kaderisasi partai merupakan sumber asli sehingga dari segi otentisitas tidak jadi masalah.

Dalam kritik intern, semua sumber-sumber yang telah dikumpulkan oleh peneliti, kredibilitasnya dapat diakui. Semua literatur baik literatur asing maupun literatur yang ditulis oleh orang Indonesia asli merupakan literatur yang beredar

---

<sup>46</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995), 136-138.

luas di Indonesia, mendapatkan izin terbit sehingga salinannya pun ada di arsip perpustakaan nasional, dapat diperoleh dengan mudah dan bisa dibaca oleh siapapun. Maksudnya di sini ialah literatur-literatur tersebut bukan termasuk golongan buku-buku yang dilarang edar di Indonesia.

### c. Interpretasi

Mengenai interpretasi, Kuntowijoyo mengungkapkan bahwa ditahap inilah terdapat subjektivitas dari sejarawan. Subjektivitas dari sejarawan membuka ruang bagi sejarawan lain untuk melakukan penafsiran ulang terhadap peristiwa sejarah. Sehingga, dalam penulisan sejarah adanya aspek subjektivitas diakui, namun tidak dapat dihindari oleh sejarawan. Selanjutnya, Kuntowijoyo membagi interpretasi menjadi dua macam yaitu analisis dan sintesis. Interpretasi analisis berarti menguraikan. Setelah analisis maka ditemukan fakta mengenai peristiwa yang sedang diteliti. Selain itu, dalam interpretasi terdapat sintesis yaitu menyatukan. Sintesis dilakukan dapat dilakukan ketika sudah ada konsep. Namun, terkadang perbedaan antara analisis dan sintesis dikesampingkan dalam proses interpretasi sejarah. Kemudian, antara data dan fakta hanya terdapat perbedaan bertingkat bukan kategoris. Sehingga, dalam penulisan sejarah, apabila terdapat perbedaan interpretasi adalah sah, walaupun datanya sama.<sup>47</sup>

Perlu diperhatikan juga bahwa ketika melakukan interpretasi, sejarawan terikat oleh logika yang telah diterima oleh semua ilmu. Kemampuan mengumpulkan sumber harus disertai kemampuan untuk menjelaskan. Sejarawan dalam interpretasi dapat juga melakukan kesalahan, seperti tidak membedakan alasan, sebab, kondisi dan motivasi. Kesalahan tersebut dapat dihindari jika sejarawan mengetahui perbedaan dari keempatnya yaitu dilihat dari kedekatannya dengan peristiwa. Selain kesalahan yang telah dijelaskan, sejarawan juga harus memperhatikan agar tidak terjadi kesalahan *post hoc, propter hoc* (sejarawan lupa mempertimbangkan faktor lain yang berpengaruh dalam peristiwa sejarah), kesalahan *reduksionalisme* (sejarawan menyederhanakan gejala yang sebenarnya

---

<sup>47</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995), 78-80.

kompleks), kesalahan *pluralisme* yang berlebihan dalam menjelaskan tema besar dan jangka panjang, sehingga dalam menjelaskan topik harus dipecah ke dalam topik yang lebih spesifik, berdasarkan permasalahan, periode atau wilayah.<sup>48</sup>

Interpretasi penulis terhadap sumber-sumber kepustakaan yang dimiliki menggunakan pendekatan hermeneutika, gunanya untuk memahami dan mendalami maksud (atau disebut juga *elrebnis*) dari pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Hasan Al Banna di dalam tulisan-tulisan yang sudah dibuatnya. Juga termasuk adalah karya-karya yang kemudian dituliskan oleh orang-orang sesudah Hasan Al Banna sehingga setelah diuraikan deskripsi konteksnya bisa dimengerti kembali tanpa menghilangkan gagasan utama dari teksnya itu sendiri.

Selain itu digunakan pula interpretasi dengan pendekatan sejarah pemikiran dan penafsiran orang besar untuk mengetahui kedalaman gagasan yang dilontarkan oleh Hasan Al Banna serta pengaruhnya terhadap perkembangan dunia pergerakan Islam.

#### **d. Historiografi**

Historiografi menurut Gottschalk adalah penulisan hasil penelitian. Historiografi adalah rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses.<sup>49</sup> Adapun Kuntowijoyo menjelaskan terdapat tiga bagian dalam penulisan hasil penelitian sejarah yaitu pengantar, hasil penelitian, dan simpulan. Dalam pengantar dikemukakan gambaran mengenai permasalahan yang akan diteliti serta sumber yang dipakai dalam penulisan sejarah. Bagian hasil penelitian mengemukakan kebolehan penulis dalam penelitian dan penyajian serta tanggungjawab yang dapat dilihat dari catatan dan lampiran. Fakta yang ditulis harus disertai data yang mendukung. Kemudian, bagian simpulan, dalam hal ini akan diungkapkan generalisasi dan makna sosial (*social significance*) dari penelitian yang dilakukan. Dalam

---

<sup>48</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995), 139-142.

<sup>49</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), 39.



simpulan, khususnya pada generalisasi akan tampak sikap sejarawan mengenai generalisasi yang sudah ada sebelumnya.<sup>50</sup>

Sejarawan dalam penulisan dapat melakukan kesalahan seperti kesalahan narasi, kesalahan argumen, dan kesalahan generalisasi. Kesalahan narasi adalah kesalahan dalam melakukan penyajian. Dalam melakukan penyajian tulisan akademis terdapat hal yang harus dihindari seperti kesalahan perodesasi, kesalahan didaktis, dan kesalahan pembahasan. Kesalahan perodesasi apabila sejarawan memandang waktu yang pasti, sedangkan kesalahan didaktis apabila sejarawan menggunakan historiografi untuk mengajarkan suatu nilai, hal tersebut merupakan suatu kesalahan karena penulisan sejarah harus murni ilmiah. Selanjutnya, kesalahan pembahasan mencakup dua hal yaitu bahasa yang emotif dan kesalahan *nonsequitur* (kalimat yang dipakai tidak sambung dengan kalimat sebelumnya). Selain sejarawan dapat melakukan kesalahan narasi, juga harus dihindari agar tidak terjadi kesalahan argumen dan kesalahan generalisasi. Kesalahan argumen terjadi ketika sejarawan melakukan kesalahan dalam menguraikan gagasannya. Kesalahan yang dapat terjadi adalah kesalahan konseptual (mempunyai dua atau lebih makna atau ambigu) dan kesalahan substantif (argumen yang dikemukakan tidak relevan atau tidak rasional). Sedangkan, kesalahan generalisasi mencakup dua kemungkinan yaitu kesalahan generalisasi yang tidak representatif (sejarawan melakukan kesalahan apabila generalisasinya disertai banyak pengecualian) dan generalisasi sebagai suatu kepastian (melihat generalisasi sebagai hukum universal yang berlaku di semua tempat dan waktu).<sup>51</sup>

Historiografi dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: Bab I akan menguraikan mengenai pendahuluan dari penelitian ini. Bab II akan menjelaskan mengenai kehidupan Hasan Al Banna dan lingkungan yang mempengaruhi pemikirannya, baik dari keluarga; pendidikan; pergaulan di sekolah; situasi global yang terjadi pada saat itu; maupun interaksi pemikiran

---

<sup>50</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995), 80-82.

<sup>51</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995), 142-145.

dengan tokoh-tokoh lain yang sezaman dengannya. Bab III akan memaparkan mengenai pengaruh pemikiran dan etika politik Hasan Al Banna terhadap Partai Keadilan Sejahtera serta memaparkan tentang sejarah Partai Keadilan Sejahtera. Bab IV adalah bab penutup dan kesimpulan dari penelitian mengenai etika politik Hasan Al Banna tersebut. Sedangkan bagian terakhir adalah daftar pustaka.

